

Bidang Ilmu : EKONOMI

LAPORAN PENELITIAN DASAR

**ANALISIS UPAH MINIMUM PROVINSI
DI TIGA WILAYAH INDONESIA
(BARAT, TENGAH DAN TIMUR) TAHUN 2008-2013**



Oleh:

Ketua : Dra. Sri Rahayu Budi Hastuti, M.Si
NIP : 19600919 198503 2 001

Anggota : Astuti Rahayu, S.E, M.Si
NIK : 2 7209 97 0173 1

Dibiayai dengan Dana LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan
Surat Penugasan Penelitian Nomor: SPP/42/VII/2015/LPPM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA
2015

Bidang Ilmu : EKONOMI

LAPORAN PENELITIAN DASAR

**ANALISIS UPAH MINIMUM PROVINSI
DI TIGA WILAYAH INDONESIA
(BARAT, TENGAH DAN TIMUR) TAHUN 2008-2013**



Oleh:

Ketua : Dra. Sri Rahayu Budi Hastuti, M.Si
NIP : 19600919 198503 2 001

Anggota : Astuti Rahayu, S.E, M.Si
NIK : 2 7209 97 0173 1

Dibiayai dengan Dana LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta sesuai dengan
Surat Penugasan Penelitian Nomor: SPP/42/VII/2015/LPPM

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" YOGYAKARTA
2015

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Penelitian : ANALISIS UPAH MINIMUM PROVINSI DI TIGA WILAYAH INDONESIA (BARAT, TENGAH DAN TIMUR) TAHUN 2008-2013
- b. Cakupan Bidang Ilmu : Ekonomi Pembangunan
- c. Arah riset : Kebijakan Pemerintah
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dra. Sri Rahayu Budi Hastuti, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Ilmu Ekonomi
3. Anggota Tim Peneliti :
- a. Jumlah Anggota Peneliti : 1 orang
- b. Nama Lengkap : Astuti Rahayu, S.E, M.Si
4. Lokasi Penelitian : Provinsi di 3 wilayah Indonesia
5. Lama Penelitian : 6 bulan
6. Biaya yang diperlukan
- a. Sumber UPN : Rp. 12.500.000,00
- b. Sumber lain (sebutkan) : -
- Jumlah : Rp. 12.500.000,00

Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi

(Dr. Muafi, S.E, M.Si)
NIK. 2 7104 99 0209 1

Ketua Peneliti

(Dra. Sri Rahayu Budi Hastuti, M.Si)
NIP. 19600919 198503 2 001

Menyetujui
Ketua LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta

(Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T)
NIP.19581202 199203 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan barokah-Nya sehingga penelitian dengan judul "ANALISIS UPAH MINIMUM PROVINSI DI TIGA WILAYAH INDONESIA (BARAT, TENGAH DAN TIMUR) TAHUN 2008-2013" telah selesai. Dalam penyelesaian penelitian ini banyak hambatan yang harus penulis hadapi, namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Heru Sigit Purwanto, M.T selaku Ketua LPPM dan stafnya yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk melakukan penelitian dengan biaya dari UPN "Veteran" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Muafi, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ibu. Dr. Sri Suharsih, S.E, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi yang selalu mendorong pada peneliti untuk terus berkarya dan terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan
3. Tinggi.Staf BPS Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya bagian Perpustakaan yang banyak membantu menyediakan/mencarikan data dan Saudara Juli yang banyak membantu .dalam mencari data dan lainnya.
4. Teman-teman sejawat jurusan Ilmu Ekonomi dan semua pihak yang pernah terlibat dalam membantu penyelesaian penelitian ini.

Penulis yakin penelitian ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun akan kami terima dengan senang hati. Akhirnya semoga bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015
Peneliti

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Hipotesis Penelitian.....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian Tenaga Kerja, Pekerja, Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan.....	6
2.2. Pengertian Upah, Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak.....	7
2.3. Tujuan Penetapan Upah Minimum.....	9
2.4. Macam-macam Upah Minimum.....	10
2.5. Penelitian Sebelumnya.	10
BAB III : KONTRIBUSI PENELITIAN.....	13
3.1. Kontribusi terhadap Dunia Pendidikan.....	13
3.2. Kontribusi terhadap Pemerintah.....	14
BAB IV : METODE PENELITIAN.....	16
4.1. Data yang Digunakan.....	16
4.2. Definisi operasional Variabel.	16
4.3. Metode Analisis Data.....	17
4.3.1. Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	18
4.3.2. Regresi Linier Berganda Data Panel.....	18
4.4. Pengujian Hipotesis.....	20

BAB V : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	23
5.1. Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	23
5.2. Analisis Pengaruh KHL, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Produktivitas dan Penawaran Tenaga Kerja terhadap UMP.....	26
5.2.1. Uji Hausman.	26
5.2.2. Hasil Estimasi.....	27
5.2.2.1. Hasil estimasi wilayah Indonesia Barat	27
5.2.2.2. Hasil estimasi wilayah Indonesia Tengah.....	29
5.2.2.3. Hasil estimasi wilayah Indonesia Timur.....	30
5.3. Pembahasan.....	32
BAB VI : PENUTUP.....	36
6.1. Kesimpulan.....	36
6.2. Saran.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
5.1 Perbandingan antara UMP dengan KHL di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013.....	24
5.2 Hasil Uji Hausman.....	26
5.3 Hasil Regresi dengan <i>Fixed Effect Model</i> (Indonesia Barat).....	27
5.4 Hasil Regresi dengan <i>Random Effect Model</i> (Indonesia Tengah)....	29
5.5 Hasil Regresi dengan <i>Fixed Effect Model</i> (Indonesia Timur).....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Hal
1	Data Asli Wilayah Indonesia Barat.....	40
2	Data Asli Wilayah Indonesia Tengah.....	42
3	Data Asli Wilayah Indonesia Timur.....	44
4	Hasil Regresi Data wilayah Indonesia Barat.....	45
5	Hasil Regresi Data wilayah Indonesia Tengah.....	48
6	Hasil Regresi Data wilayah Indonesia Timur.....	51

Abstract

This study aims: 1. to analyze that the Provincial Minimum Wage in three regions of Indonesia (Western, Central and Eastern) has fulfilled Living Needs of workers and their families or not. 2. to analyze the influence of the Living Needs, Economic Growth, Inflation, Labor Productivity and Supply of Labor to the Provincial Minimum Wage in three regions of Indonesia (Western, Central and Eastern). The analytical tool to be used for the first purpose is by comparing the magnitude of the Provincial Minimum Wage to the magnitude of the Living Needs. While the analysis tool to be used for the second purpose is linear regression panel data.

The results of study showed that during the years 2008-2013, among 33 provinces in Indonesia, there are only 2 provinces which consistently set the minimum provincial wage greater than the Living Needs, The province of North Sumatra (western region of Indonesia) and The Province of North Sulawesi (central region of Indonesia). Apparently, the minimum wage received by workers in Indonesia has not fulfilled Living Needs of workers and their families. While the linear regression results indicate that the variables which influence positively and significantly to the effect of minimum wage in the western region of Indonesia are Living Needs and inflation; in the central region of Indonesia is the Living Needs, Inflation and Productivity; and in Eastern region of Indonesia is Inflation.

Key word : Provincial Minimum Wage, Living Needs, Economic Growth, Inflation, Labor Productivity and Supply of Labor.

Intisari

Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk menganalisis bahwa Upah Minimum Provinsi di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) sudah memenuhi Kebutuhan Hidup Layak pekerja dan keluarganya atau belum. 2. untuk menganalisis pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Produktivitas Tenaga Kerja dan Penawaran Tenaga Kerja terhadap Upah Minimum Provinsi di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur). Alat analisis yang digunakan untuk tujuan pertama yaitu dengan membandingkan antara besarnya Upah Minimum Provinsi dengan besarnya Kebutuhan Hidup Layak. Sedangkan alat analisis untuk tujuan kedua digunakan regresi linier berganda data panel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2008-2013, dari 33 provinsi di Indonesia yang secara konsisten menetapkan Upah Minimum Provinsi lebih besar dari Kebutuhan Hidup Layak hanya ada 2 provinsi yaitu 1 provinsi di wilayah Indonesia Barat (Sumatra Utara) dan 1 provinsi di wilayah Indonesia Tengah (Sulawesi Utara). Dengan demikian pada umumnya Upah Minimum yang diterima pekerja di Indonesia belum memenuhi Kebutuhan Hidup Layak pekerja dan keluarganya. Sedangkan hasil regresi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi di wilayah Indonesia Barat yaitu Kebutuhan Hidup Layak dan Inflasi; di wilayah Indonesia Tengah yaitu Kebutuhan Hidup Layak, Inflasi dan Produktivitas; dan di Wilayah Indonesia Timur yaitu Inflasi.

Kata Kunci : Upah Minimum Provinsi, Kebutuhan Hidup Layak, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Produktivitas Tenaga Kerja dan Penawaran Tenaga Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Todaro (2006), pembangunan ekonomi adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, pemberantasan kemiskinan. (Todaro, 2006). Upaya pemberantasan kemiskinan selalu dilaksanakan oleh pemerintah dan upaya tersebut antara lain dengan menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) yang sekarang disebut Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun demikian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan hal yang harus ada untuk pembangunan yang berkelanjutan dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi khususnya yang ditopang dengan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja sangat diharapkan agar mampu mengatasi kemiskinan.

Namun jumlah penduduk tiap tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga terjadi pula peningkatan konsumsi dan perlu pula adanya peningkatan pendapatan (Tambunan, 2009). Di pihak lain pertumbuhan penduduk juga meningkatkan jumlah angkatan kerja yang memerlukan lapangan kerja untuk memperoleh pendapatan. Jika lapangan kerja yang tercipta tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk maka akan berakibat pada meningkatnya jumlah pengangguran. Pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi dan masih jauh dari yang diharapkan pemerintah. Oleh karena itu pengangguran yang ada sering dalam mencari pekerjaan tidak pilih-pilih pekerjaan. Bagi penganggur yang penting bisa bekerja sebagai pekerja formal dan memperoleh pendapatan untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk itu kadang menimbulkan berbagai permasalahan antara pekerja/karyawan selaku pihak yang mencari pekerjaan dengan pengusaha selaku pihak yang memberi pekerjaan. Salah satu permasalahan antara pekerja/karyawan dan pengusaha yang ada di Indonesia adalah upah. Masalah tersebut muncul karena antara pekerja dan pengusaha mempunyai pengertian dan kepentingan yang berbeda mengenai upah. Bagi seorang pekerja/karyawan dan keluarganya upah sering dianggap sebagai apa yang diterimanya dalam bentuk uang sebagai gaji atau *take home pay*. Bagi

pekerja upah sebagai sumber utama pendapatan seorang yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang bersangkutan dan keluarganya sehingga perlu diupayakan terus meningkat. Sebaliknya bagi pengusaha upah karyawan merupakan semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan mempekerjakan seorang pekerja/karyawan. Pengusaha menganggap upah sebagai beban biaya yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan.

Dari perbedaan pengertian dan kepentingan antara dua pihak tersebut, maka upah sering menimbulkan konflik antara pengusaha dengan pekerja. Di beberapa daerah masalah upah sering mengakibatkan adanya pemogokan kerja dan memunculkan demo para pekerja karena upah yang diterimanya dianggap terlalu sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Akibat terjadinya pemogokan kerja, maka perusahaan terpaksa menanggung kerugian yang tidak sedikit. Bahkan jika hal ini terjadi secara terus menerus tanpa ada penyelesaian yang jelas dan pasti akan berakibat pengusaha tidak mau lagi menanamkan modal untuk usaha di Indonesia.

Pemerintah selalu berupaya mengatasi dan mengurangi permasalahan tentang upah yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha ini dengan membuat suatu kebijakan yang disebut sebagai Upah Minimum. Upah minimum ini diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memberi upah pada para pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar. Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum berbentuk upah pokok dan tunjangan yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara wajar. Kebutuhan hidup buruh atau pekerja dan keluarganya secara wajar ini sering juga disamakan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah Minimum yang ditetapkan secara minimum regional disebut sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP).

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi besarnya upah karyawan antara lain: penawaran dan permintaan tenaga kerja, organisasi buruh, kemampuan perusahaan untuk membayar, produktivitas, biaya hidup, peraturan pemerintah. Mengingat harga barang-barang di Indonesia antar daerah tidak sama, maka besarnya biaya hidup di masing-masing daerah juga tidak sama. Biaya hidup yang dimaksudkan sering diidentikkan dengan Kebutuhan Hidup

Layak (KHL). Oleh karena itu pemerintah dalam menetapkan Upah Minimum Regional didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi maupun Bupati/Walikota yang berada di masing-masing daerah. Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari kaum akademisi, perwakilan buruh (Serikat buruh), pengusaha. UMP pada dasarnya merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada para pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur organisasi. Besarnya UMP antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing daerah. Upah Minimum Provinsi di Indonesia biasanya ditetapkan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Upah minimum tersebut mempunyai peran sangat penting atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya serta kelangsungan hidup bagi perusahaan tempat para pekerja memperoleh upah. Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (sekarang disebut KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Pertumbuhan Ekonomi daerah (Tempointeraktif, 2004). Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan komponen untuk menentukan besarnya inflasi, sehingga IHK sering diidentikkan dengan inflasi. Seperti telah disebutkan di atas Upah minimum dapat juga dipengaruhi penawaran kerja di daerah yang bersangkutan karena semakin besar penawaran tenaga kerja jika permintaan tenaga kerja tetap atau berkurang akan mengakibatkan upah minimum semakin kecil. Selain itu produktivitas tenaga kerja juga akan berpengaruh pada penentuan upah minimum. Dengan demikian faktor KHL, pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap Upah Minimum Provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini studi kasus dibedakan antara Indonesia wilayah Timur, Tengah dan Barat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013 sudah bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja?
2. Bagaimana pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013 dalam memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.
2. Menganalisis pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas tenaga kerja dan penawaran tenaga terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) Indonesia tahun 2008-2013.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Upah Minimum Provinsi antara lain :

1. Sebagai pertimbangan bagi pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dalam menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
2. Sebagai bahan referensi/acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai tambahan wawasan bagi dosen dan mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi sebagai penemuan empiris tentang Upah Minimum Provinsi.

1.5. Hipotesis Penelitian

Berdasar permasalahan di atas maka permasalahan yang pertama tidak diperlukan hipotesis karena bersifat deskriptif saja dan permasalahan yang kedua dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013.
2. Penawaran tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Tenaga Kerja, Pekerja, Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan

Menurut UU No 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan Tenaga Kerja, Pekerja, Pemberi Kerja, Pengusaha dan Perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat.
- b. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- c. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lain yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
- d. Pengusaha dapat didefinisikan dalam 3 definisi yaitu :
 1. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 2. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya.
 3. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud sebelumnya yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia.
- e. Perusahaan dapat didefinisikan dalam 3 definisi sebagai berikut :
 1. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan usaha baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

2.2. Pengertian Upah, Upah Minimum dan Kebutuhan Hidup Layak

Menurut PP Nomor 5 tahun 2003 yang dimaksud Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya (Simanjuntak, 2001). Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut UU nomor 13 tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud antara lain berupa upah minimum. Berdasar PP nomor 8/1981 yang dimaksud Upah Minimum adalah upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub sektoral. Upah minimum berbentuk upah pokok dan tunjangan yang harus dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk sandang, pangan dan keperluan rumah tangga (Tjiptoherijanto, 1989). Menurut Permen nomor 1 tahun 1999, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan. Upah ini berlaku bagi pekerja/buruh lajang dan mempunyai pengalaman 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman.

Pemerintah menetapkan upah minimum diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau

Bupati/Walikota yang berada di masing-masing daerah sehingga disebut sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Dewan Pengupahan Provinsi terdiri dari kaum akademisi, perwakilan buruh (Serikat buruh), pengusaha dan difasilitasi oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). UMP pada dasarnya merupakan upah terendah yang ditetapkan pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada para pekerja/buruh yang menduduki jabatan terendah dalam struktur organisasi.

Besarnya UMP antara satu provinsi dengan provinsi lainnya berbeda-beda tergantung pada kondisi masing-masing provinsi. Upah Minimum Provinsi di Indonesia biasanya ditetapkan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun. Upah minimum tersebut mempunyai peran sangat penting atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan para pekerja/buruh dan keluarganya serta kelangsungan hidup bagi perusahaan tempat para pekerja/buruh memperoleh upah. Upah Minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (sekarang disebut KHL), Indeks Harga Konsumen dan Pertumbuhan Ekonomi daerah (Tempointeraktif, 2004). Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, namun bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat mengajukan keberatan dan diperbolehkan melakukan penangguhan.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Di Indonesia sistem pengupahan berlandaskan UUD 1945, pasal 27 ayat 2 dan penjabarannya dalam Hubungan Industrial Pancasila yang pada umumnya didasarkan pada 3 fungsi upah atau pada prinsipnya harus : a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang dan c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas pekerja (Simanjuntak, 2001).

Dalam menentukan upah minimum terdapat 4 pihak yang saling terkait yang harus terlibat yaitu : Pemerintah, Dewan Pengupahan Nasional, Serikat Pekerja dan Wakil Pengusaha. Keempat pihak tersebut bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan untuk diadakan perubahan atau tidak (Tjiptoherijanto, 1996).

Dalam Permen Nomor 17 tahun 2005 yang dimaksud Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL sebagai dasar

penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Komponen KHL meliputi :

1. Makanan dan Minuman
2. Sandang
3. Perumahan
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Transportasi
7. Rekreasi dan Tabungan

2.3. Tujuan Penetapan Upah Minimum

Tujuan Penetapan Upah Minimum adalah sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) agar upah tidak terus mengalami penurunan sebagai akibat ketidakseimbangan pasar tenaga kerja (*disequilibrium labour market*). Selain itu penetapan upah minimum juga bertujuan untuk menjaga agar tingkat upah pekerja/buruh pada level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah karena rendahnya posisi tawar tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum harus mempertimbangkan standar kehidupan pekerja/buruh agar pekerja pada level bawah tersebut masih dapat menikmati hidup wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003, kebijakan penetapan upah minimum diarahkan untuk mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan memberi jaminan pada para pekerja/buruh penerima upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penetapan upah minimum dipandang perlu sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada pekerja/buruh.

Selain itu tujuan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah adalah :

1. Menghindari atau mengurangi persaingan yang tidak sehat sesama pekerja dalam kondisi pasar kerja yang surplus yang menyebabkan pekerja menerima upah di bawah tingkat kelayakan.

2. Menghindari atau mengurangi kemungkinan eksploitasi pekerja yang memanfaatkan kondisi pasar untuk akumulasi keuntungan.
3. Sebagai jaring pengaman untuk menjaga tingkat upah.
4. Menghindari terjadinya kemiskinan absolute pekerja melalui pemenuhan kebutuhan dasar pekerja.

2.4. Macam-macam Upah Minimum

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER 01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, maka Upah Minimum terdiri dari : UMR Tk I (Upah Minimum Regional Tingkat I), UMR Tk. II (Upah Minimum Regional Tingkat II), UMSR Tk. I (Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I) dan UMSR Tk II (Upah Minimum Regional Tingkat II).

Namun PP Nomor: PER 01/MEN/1999 tersebut dilakukan perubahan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000 yang menyebutkan bahwa Upah Minimum terdiri :

1. Upah Minimum Provinsi, adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi.
2. Upah minimum Kabupaten/Kota, adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota.
3. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi), adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di satu provinsi.
4. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/Kota), adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kota.

Menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah minimum terdiri atas :

1. Upah minimum berdasar wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Upah minimum berdasar sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

2.5. Penelitian Sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian tentang tingkat upah dan upah minimum ada beberapa penelitian yang telah dilakukan. Adapun penelitian sebelumnya antara lain :

Penelitian Syahputra (2005) tentang pengaruh kebutuhan hidup minimum (KHM), PDRB dan pengangguran terhadap upah tenaga kerja di Sleman tahun 1993-2003. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan PDRB berpengaruh positif terhadap upah.

Pusporini (2006) meneliti Pengaruh Kebutuhan Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen dan Pertumbuhan ekonomi daerah terhadap upah minimum Propinsi tahun 1994-2003. Dengan regresi berganda juga, dapat menyimpulkan bahwa Kebutuhan Hidup Minimum dan Indeks Harga Konsumen berpengaruh positif signifikan terhadap Upah minimum, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap upah minimum.

Tamada (2011) meneliti dengan judul "*Analysis of the Determinants of Wages in Japan*" menunjukkan bahwa "*Guideline Increases*" (merupakan kenaikan upah minimum yang direkomendasikan Dewan Pusat dan ditetapkan Dewan Daerah) positif dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan upah dan tidak dipengaruhi oleh perserikatan (serikat pekerja). Selain itu *Guideline Increases* juga dipengaruhi oleh rasio antara lowongan kerja dengan pelamar kerja.

Penelitian yang dilakukan Wilson (2012) dengan judul *The Negative Effects of Minimum Wage Laws*, menyimpulkan bahwa Pemerintah federal telah memberlakukan upah minimum sejak 1938, dan hampir semua Negara memaksakan memberlakukan upah minimum. Undang-undang upah minimum berusaha mencegah agar pengusaha tidak membayar upah di bawah yang ditetapkan. Tujuannya adalah untuk membantu pekerja yang *low skill*, pemuda dan kaum minoritas agar tidak dirugikan. Namun upah minimum ini pada umumnya juga merugikan pengusaha karena mengurangi laba. Akhirnya disarankan bahwa sebaiknya para pembuat kebijakan supaya lebih memikirkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja dengan harapan jika pertumbuhan ekonomi meningkat nantinya akan berpengaruh pada kenaikan upah minimum.

Penelitian yang dilakukan oleh Bersales dan Lucagdo (2014) di Negara Filipina tentang Upah Minimum Regional di bidang Non Pertanian yang berjudul "*Determinants of Regional Minimum Wages in the Philippines*" menggunakan data panel tahun 1990-2012 dengan *Fixed Effects Model* menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index), Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic Product) dan Tingkat Kerja April (April

Employment Rate) berpengaruh terhadap Upah Minimum Regional Non Pertanian.

BAB III

KONTRIBUSI PENELITIAN

3.1. Kontribusi terhadap Dunia Pendidikan

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai dengan pemerataan distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Untuk mengurangi kemiskinan sekaligus meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan, maka pekerja/buruh/karyawan perusahaan diupayakan menerima upah yang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh/karyawan yang bersangkutan dengan keluarganya secara wajar.

Namun antara pekerja/buruh/karyawan dengan pengusaha sering terjadi perbedaan pengertian dan kepentingan tentang upah. Oleh karena itu upah sering menimbulkan konflik antara pengusaha dengan pekerja/buruh/karyawan. Bagi pekerja/buruh/karyawan upah merupakan sumber utama pendapatan seorang yang harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh/karyawan yang bersangkutan dan keluarganya sehingga perlu diupayakan terus meningkat. Sebaliknya bagi pengusaha upah merupakan beban biaya yang harus ditekan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Untuk itu maka sering terjadi pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh/karyawan memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan pekerja/buruh/karyawannya sangat minim dan jauh dari harapan pekerja/buruh/karyawan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh/karyawan yang bersangkutan dengan keluarganya secara wajar. Akibatnya di beberapa daerah masalah upah sering mengakibatkan adanya pemogokan kerja dan memunculkan demo para pekerja/buruh/karyawan karena upah yang diterimanya dianggap terlalu sedikit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pekerja/buruh/karyawan dan keluarganya. Akibat terjadinya pemogokan kerja, maka perusahaan terpaksa menanggung kerugian yang tidak sedikit. Bahkan jika hal ini terjadi secara terus menerus tanpa ada penyelesaian yang jelas dan pasti akan berakibat pengusaha tidak mau lagi menanamkan modal untuk usaha di Indonesia. Bahkan di Indonesia wilayah Timur yang pada umumnya harga-harga kebutuhan hidup lebih mahal, jika upah juga mahal akan membuat pemilik modal lebih memilih di wilayah lain. Untuk itu maka penelitian ini berusaha mengkaji apakah Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan

Timur) mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Upah Minimum Provinsi (UMP) di tiga wilayah tersebut. Hasil temuan penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti dan pembaca dan bisa berkontribusi pada berbagai pihak yang berkepentingan. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi penting yang lebih jauh tentang Upah Minimum Provinsi (UMP). Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi yaitu dosen maupun mahasiswa yang ingin memperdalam mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia, Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Pembangunan, Perekonomian Indonesia dan Ekonomi Regional. Hasil penelitian ini dapat dibuat sebagai bahan buku ajar yang dapat digunakan sebagai sumbangan referensi baru dan acuan dalam perkuliahan untuk mata kuliah-mata kuliah seperti tersebut di atas.

3.2. Kontribusi terhadap Pemerintah

Tidak mudah bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan sesuai harapan karena dalam proses perjalanan pembangunan pasti ditemui banyak masalah atau tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Indonesia dari jaman pemerintahan Orde Baru sampai pemerintahan sekarang adalah pengurangan pengangguran, pencegahan kemiskinan dan meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan. Oleh karena itu pemerintah terus bertekad untuk terus meningkatkan lapangan kerja dan terus berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya pekerja/buruh/karyawan dengan ikut campur tangan menentukan besarnya upah tenaga kerja yang sering disebut sebagai Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun kadang Pemerintah merasa kesulitan dalam membuat kebijakan untuk mendukung proses pembangunan tersebut karena adanya perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh/karyawan dengan pengusaha. Hasil penelitian tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) ini diharapkan akan dapat memberi kontribusi positif khususnya pada pemerintah daerah baik di tingkat kabupaten/kota atau tingkat Provinsi di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan khususnya dalam pembuatan kebijakan pemerintah untuk menentukan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP). Apalagi masalah Upah Minimum Provinsi (UMP) bisa menimbulkan permasalahan yang sangat banyak dan kompleks antara lain yaitu sering menimbulkan aksi

pemogokan kerja pekerja/buruh/karyawan yang dapat berakibat lebih lanjut berupa merugikan perusahaan tempatnya bekerja serta menimbulkan kemacetan, perusakan lingkungan, kerusuhan, perbuatan kriminal dan lain-lain. Secara tidak langsung permasalahan ini juga akan dapat merugikan Negara yaitu menurunnya produksi Nasional dan menurunnya daya saing negara.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Data yang Digunakan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data panel gabungan data *time series* dan data *cross section*. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya atau yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini data diperoleh/bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) atau instansi pemerintah lain yang terkait. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian hanya 6 tahun yaitu tahun 2008-2013. Data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), pertumbuhan ekonomi, inflasi, produktivitas tenaga kerja, penawaran tenaga kerja dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dari 33 provinsi di Indonesia kemudian dikelompokkan ke dalam tiga wilayah meliputi : Indonesia Wilayah Barat (selanjutnya disebut Indonesia Barat), Indonesia Wilayah Tengah (selanjutnya disebut Indonesia Tengah), dan Indonesia Wilayah Timur (selanjutnya disebut Indonesia Timur). Pembagian 33 Provinsi tersebut ke dalam tiga wilayah yang dimaksud adalah : 1). Indonesia Barat terdiri 18 provinsi meliputi : Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Kalbar dan Kalteng, 2). Indonesia Tengah terdiri 11 provinsi meliputi : Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo dan Sulbar, 3). Indonesia Timur terdiri 4 provinsi meliputi : Maluku, Malut, Papua Barat dan Papua.

4.2. Definisi operasional Variabel

Agar tidak salah persepsi dalam memahami masing-masing variabel maka semua variabel dibuat definisi operasional variable sebagai berikut :

1. Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Kebutuhan yang dimaksud baik ditinjau dari segi jumlah maupun kualitas barang yang dibutuhkan tenaga kerja sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari yang terdiri dari makanan dan minuman, bahan bakar dan alat penerangan, perumahan dan alat dapur,

sandang atau pakaian dan lain-lain termasuk biaya transportasi, rekreasi, kesehatan, sarana pendidikan dan sebagainya. Dalam penelitian Kebutuhan Hidup Layak ditentukan dalam satuan rupiah per bulan.

2. Pertumbuhan Ekonomi (PE)

adalah laju peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasar harga konstan yang terjadi di masing-masing provinsi dan dinyatakan dalam satuan persen.

3. Inflasi (INF)

adalah keadaan dimana harga-harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus. Dalam penelitian ini inflasi diproksikan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK).

4. Produktivitas tenaga kerja (PROD)

adalah kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan output atau jumlah output yang dihasilkan tenaga kerja per satuan waktu. Dalam penelitian ini produktivitas merupakan output rata-rata yang dihasilkan tenaga kerja per tahun dalam satuan rupiah

5. Penawaran tenaga kerja (PEN)

adalah jumlah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan atau pengangguran. Dalam penelitian ini penawaran tenaga kerja diproksikan sebagai jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam satuan jiwa.

6. Upah Minimum Propinsi (UMP)

adalah upah terendah yang terdiri upah pokok dan tunjangan yang ditetapkan pemerintah daerah tingkat provinsi untuk dibayarkan kepada para pekerja yang menduduki jabatan terendah dalam struktur organisasi, dinyatakan dalam satuan rupiah.

4.3. Metode Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan yang telah disebutkan dalam bab pendahuluan, maka dalam penelitian ini akan digunakan dua metode analisis data yaitu perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Regresi linier berganda data panel.

4.3.1. Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Untuk mengetahui bahwa UMP yang diterima pekerja/karyawan bisa atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi karyawan yang bersangkutan beserta keluarganya secara wajar dan layak di tiga wilayah Indonesia akan dibandingkan antara besarnya UMP dengan KHL masing-masing wilayah. Jika ternyata hasil perbandingan ditemukan bahwa:

UMP < KHL, maka upah yang diterima pekerja/buruh belum bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja yang bersangkutan beserta keluarganya.

UMP ≥ KHL, maka upah yang diterima pekerja/buruh sudah bisa memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja yang bersangkutan beserta keluarganya.

4.3.2. Regresi Linier Berganda Data Panel

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh KHL, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Produktivitas dan Penawaran tenaga kerja terhadap UMP adalah Regresi Linier Berganda Data Panel. Analisis ini tidak dilakukan uji asumsi klasik karena penggunaan data panel umumnya sudah terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Persamaan regresi mengacu pada fungsi produksi Cobb-Douglas :

$$UMP = \alpha + \beta_1 KHL + \beta_2 PE + \beta_3 INF + \beta_4 PROD + \beta_5 PEN + \varepsilon_i$$

Dimana :

UMP = Upah Minimum Provinsi

KHL = Kebutuhan Hidup Layak

PE = Pertumbuhan Ekonomi

INF = Inflasi

PROD = Produktivitas Tenaga kerja

PEN = Penawaran Tenaga Kerja

α = konstanta

β = koefisien regresi

ε_i = kesalahan pengganggu

Dari persamaan tersebut agar satuan masing-masing variabel menjadi sama dan untuk memperkecil varian data, maka data (kecuali pertumbuhan

ekonomi) kemudian ditransformasikan dalam bentuk logaritma sehingga persamaannya menjadi :

$$\text{LogUMP} = \alpha + \beta_1 \text{LogKHL} + \beta_2 \text{PE} + \beta_3 \text{LogINF} + \beta_4 \text{LogPROD} + \beta_5 \text{LogPEN} + \varepsilon_i$$

Penggunaan data panel mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan data *time series* maupun data *cross section* biasa (Hsiao,19950). Pertama ia biasa memberikan kepada peneliti sejumlah data yang banyak meningkatkan derajat kebebasan dan mengurangi hubungan (*kolinearitas*) diantara variable penjelas, sehingga akan menghasilkan estimasi ekonometrik yang efiseien. Kedua data yang longitudinal memperbolehkan untuk menganalisis sejumlah pertanyaan penting yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan menggunakan data *time series* dan *cross section* saja.

Dalam analisis regresi berganda dengan menggunakan data panel, terdapat tiga pendekatan/model yaitu analisis regresi dengan pendekatan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*.

1. Common Effect Model

Pendekatan *Common Effect Model*, merupakan suatu metode perhitungan dalam analisis regresi yang diterapkan untuk data panel. Dengan metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)*. Teknik ini hanya bersifat menggabungkan data *cross section* dengan *time series* saja, tanpa memandang adanya perbedaan individualitas setiap observasi. Bentuk umum dari model tersebut adalah :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + e_{it}$$

2. Fixed Effect Model

Pendekatan *Fixed Effect Model* ini telah memberikan perbedaan individualitas pada setiap observasi. Perbedaan tersebut terletak pada *intercept* dari masing-masing individu, sementara slope masih tetap sama. Bentuk umum dari model regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* tersebut adalah :

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \mu_{it}$$

3. Random Effect Model

Pendekatan *Random Effect Model* ini, secara lebih spesifik menguraikan perbedaan individualitas pada setiap observasi bukan hanya berdasarkan

interceptnya, melainkan juga dengan menguraikan komponen error dari model. Dengan mengacu pada model *Fixed Effect*, maka kemudian intercept yang bervariasi dari model tersebut diuraikan menjadi dua bagian, yaitu menjadi *intercept* yang *konstan* dan *error term* yang bervariasi. Selanjutnya *error term* dari setiap individu (ε_i) yang bervariasi tersebut dikelompokkan bersama *error term* dari masing-masing individu antar waktu (μ_{it}). Dan bentuk umum dari model tersebut kemudian dapat dituliskan :

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \omega_{it}$$

$$\text{dimana : } \omega_{it} = \varepsilon_i + \mu_{it}$$

Untuk olah data dalam penelitian ini menggunakan evIEWS 6, yang langsung dapat dilakukan uji Hausman untuk mengadakan pilihan model yang paling baik antara *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*. Keputusan penggunaan *fixed effect Model* atau *random effect Model* ditentukan dengan menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh Hausman yaitu dengan melihat nilai *chi square Statistic*. Seperti yang sudah diketahui bahwa penggunaan *fixed effect Model* mengandung suatu unsur *trade-off* yaitu hilangnya derajat bebas dengan memasukkan variabel dummy. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis:

H_0 : Model *Random Effect*

H_1 : Model *Fixed Effect*

Sebagai dasar penolakan hipotesis nol tersebut dengan menggunakan pertimbangan *Chi Square Statistic*. *Hausman Test* dapat dilakukan dengan bahasa pemrograman EvIEWS yaitu jika hasil dari *Hausman Test* signifikan (probability dari Hausman $< \alpha$) maka H_0 ditolak, artinya model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan.

4.4. Pengujian Hipotesis

Setelah masing-masing regresi sudah diuji dan terpilih pendekatan/model yang baik, maka akan dilakukan uji statistik yang terdiri atas uji t, uji F dan uji *goodness of fit* sebagai berikut :

1. Uji t

Uji t ini dilakukan untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Dalam uji hipotesis

satu sisi baik sisi sebelah kanan maupun sisi sebelah kiri, kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

a. Uji hipotesis satu sisi sebelah kanan

Hipotesis :

Ho : $\beta \leq 0$, artinya secara individu variabel independen tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Ha : $\beta > 0$, artinya secara individu variabel independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

Ho diterima jika t-hitung < t-tabel

Ho ditolak jika t-hitung > t-tabel

b. Uji hipotesis satu sisi sebelah kiri

Hipotesis :

Ho : $\beta \geq 0$, artinya secara individu variabel independen tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen

Ha : $\beta < 0$, artinya secara individu variabel independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria pengujian :

Ho diterima jika t-hitung > t-tabel

Ho ditolak jika t-hitung < t-tabel

2. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam uji F, kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

Hipotesis :

Ho: $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Ha: $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$, artinya secara bersama variabel independen Berpengaruh terhadap variabel dependen

Kriteria pengujian :

Ho diterima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ dan

Ho ditolak jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

3. Uji *goodness of fit* (Uji koefisien determinasi = R^2)

Uji *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui kesesuaian/ketepatan model yang digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi atau nilai R^2 . Adapun rumus koefisien determinasi adalah :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS},$$

dimana :

ESS = jumlah kwadrat terkecil

TSS = total jumlah kuadrat.

Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0-1). Nilai R^2 semakin besar atau semakin mendekati satu (1) maka akan semakin tepat/sesuai model yang digunakan, sebaliknya semakin kecil atau semakin mendekati nol (0) maka semakin tidak tepat/sesuai model yang digunakan. Nilai koefisien determinasi ini sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perubahan variabel independen dapat menjelaskan variasi perubahan variabel dependen.

BAB V

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Perbandingan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Seperti telah disebutkan dalam alat analisis data bahwa untuk mengetahui Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diterima pekerja/karyawan bisa memenuhi kebutuhan hidup bagi pekerja/karyawan yang bersangkutan beserta keluarganya secara wajar atau tidak di tiga wilayah Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) pada tahun 2008-2013, maka akan dibandingkan antara besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) provinsi di masing-masing wilayah tersebut. Jika ditemukan bahwa ternyata $UMP < KHL$, maka upah yang diterima pekerja/karyawan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja/karyawan yang bersangkutan beserta keluarganya secara layak dan wajar, sebaliknya jika $UMP \geq KHL$, maka upah yang diterima pekerja/karyawan sudah bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja/karyawan yang bersangkutan beserta keluarganya secara layak dan wajar. Seperti telah disebutkan juga dalam bab sebelumnya bahwa pembagian 33 Provinsi ke dalam tiga wilayah adalah: 1). Indonesia Barat terdiri 18 provinsi meliputi: Aceh, Sumut, Sumbar, riau, jambi, sumsel, Bengkulu, Lampung, Babel, Kep. Riau, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Banten, Kalbar dan Kalteng, 2). Indonesia Tengah terdiri 11 provinsi meliputi: Bali, NTB, NTT, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Sulsel, Sultra, Gorontalo dan Sulbar, 3). Indonesia Timur terdiri 4 provinsi meliputi : Maluku, Malut, Papua Barat dan Papua.

Penetapan upah minimum diarahkan kepada pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Upah minimum ini ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota yang berada di masing-masing daerah sehingga disebut sebagai Upah Minimum Propinsi (UMP) dan/atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Untuk itu seharusnya besarnya UMP lebih besar daripada KHL. Adapun hasil perbandingan antara besarnya UMP dengan KHL masing-masing provinsi di tiga wilayah Indonesia dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Perbandingan antara UMP dengan KHL di tiga wilayah
Indonesia (Barat, Tengah dan Timur) tahun 2008-2013 (ribu rupiah)

Provinsi	2008		2009		2010		2011		2012		2013	
	UMP	KHL	UMP	KHL	UMP	KHL	UMP	KHL	UMP	KHL	UMP	KHL
Indonesia Barat												
ACEH	1000,0	1200,0	1200,0	1400,0	1300,0	1400,0	1350,0	1476,1	1400,0	1531,5	1550,0	1514,4
SUMUT	822,2	783,0	905,0	855,1	965,0	916,1	1035,5	966,0	1200,0	1035,0	1375,0	1295,0
SUMBAR	800,0	871,0	880,0	896,9	950,0	976,0	1055,0	1099,2	1150,0	1153,5	1350,0	1348,2
RIAU	800,0	815,7	901,6	1022,7	1016,0	1053,0	1120,0	1230,5	1238,0	1312,9	1400,0	1499,4
JAMBI	724,0	743,2	800,0	918,1	900,0	970,7	1028,0	1027,8	1142,5	1143,6	1300,0	1321,6
SUMSEL	743,0	1100,0	824,7	929,6	927,8	1031,9	1048,4	1060,9	1195,2	1311,0	1350,0	1757,0
BENGGKULU	683,5	714,8	728,0	742,5	780,0	789,0	815,0	808,0	930,0	884,3	1200,0	1216,1
LAMPUNG	617,0	650,0	691,0	805,3	767,5	861,3	855,0	897,6	975,0	1008,1	1150,0	1060,1
BABEL	813,0	978,7	850,0	1237,0	910,0	1150,5	1024,0	1562,0	1110,0	1540,3	1265,0	1555,2
KEP.RIAU	833,0	923,0	892,0	1022,0	925,0	1073,3	975,0	1139,9	1015,0	1080,3	1365,1	1395,4
DKI JKT	972,6	1055,3	1069,9	1314,1	1118,0	1317,7	1290,0	1404,8	1529,0	1497,8	2200,0	1978,8
JABAR	568,2	614,3	628,2	731,7	671,5	743,1	732,0	874,7	780,0	874,7	850,0	946,7
JATENG	547,0	612,2	575,0	793,7	660,0	804,0	675,0	833,5	765,0	833,5	830,0	857,7
DIY	586,0	687,1	700,0	820,5	745,7	750,5	808,0	802,3	892,7	862,4	947,1	924,3
JATIM	500,0	544,2	570,0	706,7	630,0	856,9	705,0	731,6	745,0	731,6	745,0	731,6
BANTEN	837,0	851,5	917,5	917,6	955,3	955,7	1000,0	1019,9	1042,0	1108,0	1170,0	1170,0
KALBAR	645,0	776,9	705,0	803,9	741,0	866,3	802,5	931,1	900,0	1327,0	1060,0	1402,9
KALTENG	765,9	825,0	873,1	910,7	986,5	947,1	1134,6	1095,0	1225,0	1720,4	1553,1	1919,4
Indonesia Tengah												
BALI	682,7	711,1	760,0	956,3	829,3	959,2	890,0	1101,8	967,5	1130,8	1181,0	2117,0
NTB	730,0	727,7	832,5	860,0	890,8	1460,1	950,0	1007,0	1000,0	1222,1	1100,0	1403,7
NTT	650,0	782,5	725,0	909,0	800,0	943,4	850,0	973,0	925,0	1164,2	1010,0	1336,0
KALSEL	825,0	790,0	930,0	947,0	1024,5	997,0	1126,0	1053,4	1327,4	1227,0	1337,5	1227,5
KALITIM	815,0	935,4	955,0	1209,9	1002,0	1327,8	1084,0	1435,4	1177,0	1531,5	1752,1	1752,1
SULUT	845,0	802,0	929,5	863,7	990,0	966,4	1050,0	935,0	1250,0	1077,9	1550,0	1291,6
SULTENG	670,0	733,0	720,0	915,0	777,5	890,0	827,5	900,0	885,0	900,0	995,0	1036,0
SULSEL	740,5	754,9	905,0	1154,1	1000,0	1049,3	1100,0	1083,0	1200,0	1161,4	1440,0	1380,5
SULTRA	700,0	640,0	770,0	823,8	860,0	895,2	930,0	1013,8	1032,3	1232,8	1125,2	1207,7
GORONTALO	600,0	798,9	675,0	889,0	710,0	921,6	762,5	996,4	837,5	1099,2	1175,0	1539,5
SULBAR	760,5	850,0	909,4	1126,0	944,2	1259,0	1006,0	1381,5	1127,0	1381,5	1165,0	1403,7
Indonesia Timur												
MALUKU	700,0	1182,6	775,0	1280,6	840,0	1401,0	900,0	1571,0	975,0	1739,0	1275,0	1738,7
MALUT	700,0	1090,1	770,0	1520,0	847,0	1500,1	889,4	1090,0	960,5	1903,3	1200,6	1712,0
PAPUA BRT	1050,0	1638,7	1100,0	1325,8	1210,0	1421,8	1410,0	1800,0	1450,0	1800,0	1720,0	2117,0
PAPUA	1105,5	1638,7	1216,0	1734,1	1316,5	1799,2	1403,0	1781,4	1515,0	1904,0	1710,0	2069,3

Sumber : Depnakertrans
 Keterangan : UMP>KHL dicetak tebal

Berdasar tabel 5.1, dapat dilihat bahwa tahun 2008-2013 dari 33 provinsi di Indonesia yang dibagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur hampir semuanya UMP lebih kecil daripada KHL. Provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL pada tahun 2008 hanya ada 5 provinsi yaitu 1 provinsi berada di Indonesia Barat (Sumut) dan 4 Provinsi berada di Indonesia Tengah (NTB, Kalsel, Sulut dan Sultra). Pada tahun 2009 UMP lebih besar daripada KHL turun menjadi hanya 2 provinsi yaitu 1 provinsi berada di Indonesia Barat (Sumut) dan 1 Provinsi berada di Indonesia Tengah (Sulut).

Pada tahun 2010-2013 perkembangan jumlah Provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL dari tahun ke tahun cukup menggembirakan karena setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL hanya 4 provinsi yaitu 2 provinsi berada di Indonesia Barat (Sumut dan Kalteng) dan 2 Provinsi berada di Indonesia Tengah (Kalsel dan Sulut). Pada tahun 2011 provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL meningkat menjadi 8 provinsi yaitu 5 provinsi berada di Indonesia Barat (Sumut, Jambi, Bengkulu, DIY dan Kalteng) dan 3 Provinsi berada di Indonesia Tengah (Kalsel, Sulut dan Sulsel). Pada tahun 2012 provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL meningkat lagi menjadi 9 provinsi yaitu 6 provinsi berada di Indonesia Barat (Sumut, Sumbar, Bengkulu, DKI Jakarta, DIY dan Jatim) dan 3 Provinsi berada di Indonesia Tengah (Kalsel, Sulut dan Sulsel). Pada tahun terakhir yaitu tahun 2013 provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL meningkat lagi menjadi 10 provinsi yaitu 7 provinsi berada di Indonesia Barat (Aceh, Sumut, Sumbar, Lampung, DKI Jakarta, DIY dan Jatim) dan 3 Provinsi berada di Indonesia Tengah (Kalsel, Sulut dan Sulsel).

Provinsi yang secara konsisten memberikan atau menetapkan UMP lebih besar daripada KHL pada tahun 2008-2013 dari 33 provinsi ternyata hanya ada 2 provinsi yaitu 1 provinsi di Indonesia Barat (Sumut) dan 1 provinsi di Indonesia Tengah (Sulut). Provinsi di wilayah Indonesia Timur tidak ada satupun yang UMP lebih besar dari pada KHL. Berdasar kenyataan tersebut menunjukkan bahwa UMP yang diberikan pada pekerja/karyawan umumnya lebih rendah daripada KHL. UMP yang diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memberi upah pada para pekerja/karyawan agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja/karyawan dan

keluarganya secara wajar dan layak belum bisa terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa di masing-masing provinsi upah per bulan yang diperoleh pekerja/karyawan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/karyawan beserta keluarganya secara wajar dan layak.

5.2. Analisis Pengaruh KHL, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Produktivitas dan Penawaran Tenaga Kerja terhadap UMP.

5.2.1. Uji Hausman

Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda menggunakan data panel. Analisis ini tidak dilakukan uji asumsi klasik karena penggunaan data panel umumnya sudah terbebas dari pelanggaran asumsi klasik. Untuk mengetahui pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di tiga wilayah Indonesia, maka akan dilakukan Uji Hausman terlebih dahulu agar dapat memilih model estimasi yang lebih baik atau terbaik. Hasil Uji menentukan model yang terbaik dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Hasil Uji Hausman

Wilayah	Chi-Sq Stat	Chi-Sq.d.f	Prob.	Keterangan(Yang baik)
Indonesia Barat	14,902964	5	0,0108	<i>Fixed Effect Model</i>
Indonesia Tengah	2,357995	5	0,7977	<i>Random Effect Model</i>
	F-Stat	d.f	Prob.	
Indonesia Timur	4,642697	3,15	0,0173	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: hasil olah data

Berdasar tabel 5.2 hasil uji Hausman untuk wilayah Indonesia Barat menunjukkan bahwa nilai chi square Statistic sebesar 14.902964 dengan probabilitas 0.0108, sehingga nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari pada alpha sebesar 0.05 ($0.0108 < 0.05$) dan model yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect model*. Sedangkan untuk wilayah Indonesia Tengah menunjukkan bahwa nilai chi square statistic sebesar 2,357995 dengan probabilitas 0.7977, sehingga nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar dari

pada alpha sebesar 0.05 ($0.7977 > 0.05$) dan model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect model*. Untuk wilayah Indonesia Timur dikarenakan jumlah provinsi lebih sedikit yaitu hanya 4 dan lebih kecil daripada jumlah variable bebasnya, maka tidak dilakukan uji Hausman melainkan dengan uji F untuk memilih *common Effect model* atau *fixed effect model*. Berdasar hasil uji F maka yang lebih tepat digunakan adalah *fixed effect model*.

5.2.2. Hasil Estimasi

5.2.2.1. Hasil estimasi wilayah Indonesia Barat

Hasil estimasi pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Barat yang menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (Indonesia Barat)

Dependent Variable: LOG(UMP)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Ket.
C	-7.765618	5.440440	-1.427388	0.1571	
LOG(KHL)	0.259925	0.064481	4.031045	0.0001	Signifikan
PE	0.003111	0.004394	0.708017	0.4809	Tdk signifikan
LOG(INF)	1.236500	0.241899	5.111639	0.0000	Signifikan
LOG(PROD)	0.246724	0.203513	1.212327	0.2287	Tdk signifikan
LOG(PEN)	0.057211	0.214747	0.266412	0.7906	Tdk signifikan
R-squared	0.968264				
Adjusted R-squared	0.960050				
F-statistic	117.8782				
Prob(F-statistic)	0.000000				

Sumber : data diolah

Dari tabel 5.3 dapat dilihat pengaruh secara parsial/individual masing-masing variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Berdasar hasil uji t dengan $\alpha = 5\%$, secara individual dari 5 variabel bebas yang dimasukkan dalam model hanya ada 2 variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP wilayah Indonesia Barat, sedangkan 3 variabel lainnya

tidak berpengaruh signifikan. Adapun variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP di wilayah Indonesia Barat yang dimaksud adalah variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Inflasi (INF). Nilai t-hitung variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 4,031045 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,658 sehingga KHL berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi KHL sebesar 0,259925, berarti apabila KHL meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 0,259925% dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan nilai t-hitung variabel Inflasi sebesar 5,111639 juga lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,658 sehingga Inflasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi Inflasi sebesar 1,236500, berarti apabila Inflasi meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 1,236500% dengan asumsi variabel lain tetap.

Uji F dilakukan untuk melihat secara simultan/bersama-sama pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel tidak bebas (*dependent*). Hasil olah data pada $\alpha = 5\%$, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 117.8782 lebih besar daripada F tabel sebesar 2,29. Dengan demikian H_0 ditolak yang artinya secara simultan/bersama-sama variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Barat.

Hasil uji *goodness of fit* (uji kesesuaian/ketepatan) model yang digunakan dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi atau nilai R^2 . Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan satu (0-1). Nilai R^2 semakin besar atau semakin mendekati satu (1) maka akan semakin tepat/sesuai model yang digunakan, sebaliknya semakin kecil atau semakin mendekati nol (0) maka semakin tidak tepat/sesuai model yang digunakan. Nilai koefisien determinasi ini sekaligus dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan perubahan variabel dependen. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.968264 atau mendekati satu sehingga model yang digunakan tepat/sesuai. Nilai $R^2 = 0.968264$, juga berarti bahwa perubahan variabel UMP di wilayah Indonesia Barat dapat dijelaskan oleh perubahan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) sebesar 96,8264%, sedangkan sisanya

yang sebesar 3,1736% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

5.2.2.2. Hasil estimasi wilayah Indonesia Tengah

Hasil estimasi pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Tengah yang menggunakan *Random Effect Model* dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut:

Tabel 5.4

Hasil Regresi dengan *Random Effect Model* (Indonesia Tengah)

Dependent Variable: LOG(UMP)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Ket
C	-4.623607	1.026871	-4.502615	0.0000	
LOG(KHL)	0.257849	0.073615	3.502644	0.0009	Signifikan
PE	-0.000320	0.004288	-0.074604	0.9408	Tdk signifikan
LOG(INF)	1.151964	0.156825	7.345547	0.0000	Signifikan
LOG(PROD)	0.116833	0.051127	2.285132	0.0260	Signifikan
LOG(PEN)	0.026988	0.058439	0.461809	0.6459	Tdk signifikan
R-Squared	0.898621				
Adjusted R-Squared	0.889882				
F-Statistic	102.8225				
Prob(F-Statistic)	0.000000				

Sumber : data diolah

Dari tabel 5.4 dapat dilihat berdasar hasil uji t dengan $\alpha = 5\%$, secara individual dari 5 variabel bebas yang dimasukkan dalam model hanya ada 3 variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP wilayah Indonesia Tengah, sedangkan 2 variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. Adapun variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP di wilayah Indonesia Tengah adalah variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Inflasi (INF) dan Produktivitas Tenaga Kerja (PROD). Nilai t-hitung variabel KHL sebesar 3,502644 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,671 sehingga KHL berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi KHL sebesar 0,257849, berarti apabila KHL meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 0,257849% dengan asumsi variabel lain tetap. Sedangkan nilai t-hitung variabel INF sebesar

7.345547 juga lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,671 sehingga Inflasi juga berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi Inflasi sebesar 1,151964, berarti apabila inflasi meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 1,151964% dengan asumsi variable lain tetap. Begitu juga nilai t-hitung variabel PROD sebesar 2.285132 juga lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,671 sehingga Produktivitas juga berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi Produktivitas sebesar 0,116833, berarti apabila Produktivitas meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 0,116833% dengan asumsi variable lain tetap.

Hasil uji F pada $\alpha = 5\%$, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 102.8225 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,37. Dengan demikian secara simultan/bersama-sama variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Tengah.

Hasil uji *goodness of fit* (uji kesesuaian/ketepatan) dari nilai koefisien determinasi atau nilai R^2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.898621 atau mendekati satu sehingga model yang digunakan juga tepat. Nilai $R^2=0.898621$ berarti bahwa perubahan variabel UMP di wilayah Indonesia Tengah dapat dijelaskan oleh perubahan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) sebesar 89,8621%, sedangkan sisanya yang sebesar 10,1379% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

5.2.2.3. Hasil estimasi wilayah Indonesia Timur

Hasil estimasi pengaruh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Timur yang menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dilihat di tabel 5.5.

Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa berdasar hasil uji t dengan $\alpha = 5\%$, secara individual dari 5 variabel bebas yang dimasukkan dalam model hanya ada 1 variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP wilayah Indonesia Timur, sedangkan 4 variabel lainnya tidak berpengaruh signifikan. Adapun

variabel yang berpengaruh positif signifikan terhadap UMP di wilayah Indonesia Timur adalah variabel Inflasi (INF). Nilai t-hitung variabel Inflasi (INF) sebesar 5.890421 lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,711 sehingga Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Koefisien regresi Inflasi sebesar 1,623159, berarti apabila Inflasi meningkat 1% maka UMP akan meningkat juga sebesar 1,623159% dengan asumsi variable lain tetap.

Tabel 5.5

Hasil Regresi dengan *Fixed Effect Model* (Indonesia Timur)

Dependent Variable: LOG(UMP)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Ket.
C	-4.390953	3.124248	-1.405443	0.1803	
LOG(KHL)	0.095843	0.098630	0.971741	0.3466	Tdk signifikan
PE	-0.000997	0.001675	-0.595512	0.5604	Tdk signifikan
LOG(INF)	1.623159	0.275559	5.890421	0.0000	Signifikan
LOG(PROD)	0.060344	0.100090	0.602891	0.5556	Tdk signifikan
LOG(PEN)	0.085980	0.207014	0.415336	0.6838	Tdk signifikan
R-squared	0.977938				
Adjusted R-squared	0.966172				
F-statistic	83.11399				
Prob(F-statistic)	0.000000				

Sumber : data diolah

Hasil uji F pada $\alpha = 5\%$, menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 83.11399 lebih besar daripada F-tabel sebesar 2,74. Dengan demikian secara simultan/bersama-sama variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Propinsi (UMP) di wilayah Indonesia Timur.

Hasil uji *goodness of fit* (uji kesesuaian/ketepatan) dari nilai koefisien determinasi atau nilai R^2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi sebesar 0.977938 atau mendekati satu sehingga model yang digunakan juga tepat. Nilai $R^2=0.977938$ berarti bahwa perubahan variabel UMP di wilayah Indonesia Tengah dapat dijelaskan oleh perubahan variabel Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) sebesar 97,7938%, sedangkan sisanya

yang sebesar 2,2062% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan.

5.3. Pembahasan

Berdasar perbandingan besarnya Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 33 provinsi di Indonesia yang tersebar dalam tiga wilayah Indonesia pada tahun 2008-2013 pada umumnya UMP lebih kecil dari pada KHL. Jumlah Provinsi yang UMP lebih besar daripada KHL selama kurun waktu tersebut berfluktuasi atau naik turun. Tahun 2008-2009 dari 5 provinsi turun menjadi 2 provinsi. Namun sejak tahun 2010-2013 mengalami kenaikan terus menerus dari 4 provinsi pada tahun 2010 menjadi 10 provinsi pada tahun 2013. Provinsi yang secara konsisten memberikan atau menetapkan UMP lebih besar daripada KHL pada tahun 2008-2013 dari 33 provinsi ternyata hanya ada 2 provinsi yaitu 1 provinsi di wilayah Indonesia Barat (Sumut) dan 1 provinsi di wilayah Indonesia Tengah (Sulut). Provinsi di wilayah Indonesia Timur tidak ada satupun yang UMP lebih besar dari pada KHL. Berdasar kenyataan tersebut menunjukkan bahwa UMP yang diberikan pada pekerja/karyawan umumnya lebih rendah daripada KHL dan menunjukkan bahwa di masing-masing provinsi UMP per bulan yang diperoleh pekerja/karyawan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/karyawan beserta keluarganya secara wajar dan layak.

Ketidakmampuan UMP untuk memenuhi KHL menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan pekerja/karyawan, pengusaha, dan pemerintah. Dari sisi pekerja/karyawan rendahnya UMP yang masih di bawah KHL menyebabkan pekerja/karyawan harus melakukan penghematan dan dimungkinkan hidup dalam lingkaran hutang. Kondisi hidup yang demikian akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas pekerja/karyawan. Kinerja dan produktivitas pekerja/karyawan yang rendah akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya daya saing perusahaan. Untuk itu maka agar kinerja dan produktivitas pekerja/karyawan meningkat maka besarnya UMP harus lebih besar daripada KHL (Tjandraningsih dan Herawati, 2009).

Pemenuhan KHL bagi pekerja/karyawan, bukan hanya menjadi tanggung jawab pengusaha semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

Bagi pemerintah UMP memang menjadi masalah yang sangat dilematis karena dengan menetapkan UMP lebih besar daripada KHL sering mengakibatkan keberatan bagi para pengusaha untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, apalagi bagi perusahaan yang banyak menggunakan pekerja/karyawan atau cenderung padat karya karena kenaikan upah berarti kenaikan biaya yang cukup besar. Kenaikan biaya ini dikhawatirkan oleh para pengusaha akan dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan yang selanjutnya dapat mengancam keberlangsungan perusahaan. Upah memang merupakan kepentingan yang berlawanan antara pekerja/karyawan dengan pengusaha. Di pihak pekerja/karyawan upah meningkat akan disambut gembira karena dapat meningkatkan kesejahteraan, namun bagi pengusaha upah merupakan biaya yang akan mengurangi keuntungan.

UMP yang ditetapkan pemerintah dan diharapkan bisa menjadi acuan/pedoman bagi para pengusaha untuk melaksanakan kewajibannya memberi upah atau balas jasa pada para pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar dan layak belum bisa terlaksana dengan baik. Upah minimum yang lebih rendah daripada KHL akan menyebabkan kinerja dan produktivitas pekerja/buruh relative rendah yang selanjutnya juga mengakibatkan kinerja dan produktivitas perusahaan juga rendah. Rendahnya kinerja dan produktivitas perusahaan akan berpengaruh pada daya saing perusahaan yang akan kalah dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu agar pekerja/buruh mampu memenuhi KHL maka upah harus ditingkatkan melebihi KHL. Untuk itu maka pada waktu-waktu yang akan datang hendaknya pemerintah dalam menentukan UMP ini dapat memperhatikan besarnya KHL atau setidaknya jika belum bisa lebih besar daripada KHL maka disamakan dengan KHL.

Secara individu di tiga wilayah Indonesia yaitu Indonesia Barat, Tengah dan Timur, hanya Inflasi yang semuanya berpengaruh positif signifikan terhadap UMP. Setelah inflasi diikuti KHL yang secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di dua wilayah Indonesia yaitu Indonesia Barat dan Tengah. Urutan ketiga yaitu Produktivitas Tenaga Kerja yang berpengaruh positif signifikan di satu wilayah yaitu di Indonesia Tengah.

Inflasi dan KHL berpengaruh positif terhadap UMP, maka hal ini sesuai dengan hipotesis dan sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan

oleh Pusporini yang menyimpulkan bahwa IHK (sebagai proksi dari Inflasi) dan KHL (dulu disebut KFM) berpengaruh positif terhadap UMP. Inflasi (yang diproksikan dengan IHK) berpengaruh terhadap UMP juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bersales dan Lucagdo (2014) bahwa Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) berpengaruh positif terhadap Upah Minimum Regional Non Pertanian di Filipina. Produktivitas tenaga kerja juga berpengaruh positif terhadap UMP berarti sesuai hipotesis dan sesuai harapan pemerintah bahwa dalam memberikan UMP hendaknya memperhatikan produktivitas pekerja/karyawan.

Pertumbuhan Ekonomi di tiga wilayah Indonesia tidak berpengaruh terhadap UMP, berarti menunjukkan atau mengindikasikan bahwa semakin makmurnya suatu provinsi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi belum menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah Provinsi dalam menetapkan besarnya UMP. Hal ini juga dimungkinkan bahwa pada masing-masing provinsi pertumbuhan ekonomi banyak disumbang oleh perusahaan yang cenderung menggunakan teknologi tinggi atau padat modal. Begitu juga Penawaran tenaga kerja yang diduga berpengaruh negatif terhadap UMP ternyata juga tidak berpengaruh terhadap UMP. Penawaran Tenaga kerja yang diproksikan dengan jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap UMP karena meningkatnya angkatan kerja tersebut belum tentu mencari pekerjaan dan bekerja di provinsi yang bersangkutan dan belum tentu memilih bekerja di sektor formal seperti di perusahaan-perusahaan. Dengan demikian variable yang berpengaruh terhadap UMP di masing-masing provinsi yang dimasukkan dalam model penelitian ini hanya KHL, Inflasi dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan penawaran tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap UMP.

Secara bersama-sama dari lima variabel bebas yang dimasukkan dalam model, semua variable yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) berpengaruh terhadap UMP di tiga wilayah Indonesia. Hal ini didukung oleh nilai koefisien determinasi rata-rata dari tiga wilayah Indonesia sebesar 0.94827. Nilai ini menunjukkan bahwa perubahan UMP di tiga wilayah Indonesia rata-rata 94,827% dapat dijelaskan oleh perubahan variable bebas dalam model dan sisanya oleh variable bebas di luar model. Yang dimaksud variable bebas di luar model misalnya antara lain

Pendidikan tenaga kerja, jenis kelamin tenaga kerja, serikat pekerja dan lain sebagainya.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari 33 provinsi di Indonesia yang tersebar dalam tiga wilayah Indonesia yaitu Indonesia Barat, Tengah dan Timur pada tahun 2008-2013 yang menetapkan UMP lebih besar dari KHL berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan khususnya terjadi pada tahun 2010-2013 yang semula hanya hanya 4 provinsi meningkat menjadi 10 provinsi. Namun hanya ada 2 provinsi yang secara terus dan konsisten menentukan UMP lebih besar daripada KHL yaitu provinsi Sumut dari wilayah Indonesia Barat dan Sulut dari wilayah Indonesia Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa di masing-masing provinsi upah per bulan yang diperoleh pekerja/karyawan hampir seluruhnya belum mampu memenuhi kebutuhan hidup diri pekerja/karyawan sendiri dan keluarganya secara wajar dan layak.
2. a. Secara individu variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP di wilayah Indonesia Barat yaitu KHL, Inflasi. Di wilayah Indonesia Tengah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP yaitu KHL, Inflasi dan Produktivitas. Di Wilayah Indonesia Timur yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap UMP yaitu Inflasi saja. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan di tiga wilayah Indonesia, KHL berpengaruh positif dan signifikan di dua wilayah (Indonesia Barat dan Tengah), serta produktivitas berpengaruh positif di Indonesia Tengah. Variabel pertumbuhan ekonomi dan Penawaran tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap UMP di semua wilayah Indonesia.
b. Secara bersama-sama semua variable yang dimasukkan dalam model yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), Pertumbuhan Ekonomi (PE), Inflasi (INF), Produktivitas Tenaga Kerja (PROD) dan Penawaran Tenaga Kerja (PEN) berpengaruh terhadap UMP di tiga wilayah Indonesia. Nilai koefisien determinasi rata-rata dari tiga wilayah Indonesia sebesar 0.94827 yang menunjukkan bahwa perubahan UMP di tiga wilayah Indonesia rata-rata

sebesar 94,827% dapat dijelaskan oleh perubahan variable bebas dalam model dan sisanya oleh variable bebas di luar model.

6.2. Saran

Dari kesimpulan dapat dibuat saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja atau karyawan di Indonesia. Saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengingat bahwa dari 33 provinsi di Indonesia yang terus dan konsisten menetapkan UMP lebih besar dari KHL di tiga wilayah Indonesia hanya ada 2 provinsi, maka hendaknya pada waktu-waktu yang akan datang dalam menetapkan UMP hendaknya pemerintah memperhatikan besarnya KHL agar kebutuhan hidup wajar dan layak dapat dinikmati oleh pekerja/karyawan.
2. Mengingat pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap UMP, maka dapat diartikan PDRB provinsi yang meningkat lebih banyak dinikmati para pemilik modal saja. Untuk itu hendaknya pertumbuhan ekonomi bisa dipertimbangkan dalam penentuan UMP di masing-masing provinsi di tiga wilayah Indonesia agar terjadi peningkatan kemakmuran yang bisa dinikmati pekerja/karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- , (1999), Permen nomor 1 tahun 1999 tentang Upah Minimum
- , (2005), Permenakertrans RI Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
- , (2003), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Ananta, Aris, (1990), *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, FE UI, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, *Indikator Tingkat Hidup Pekerja*, beberapa edisi
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia*, beberapa edisi
- Bersales, Lisa Grace S. and Lucagdo, Michael Daniel C. (2014), *Determinants of Regional Minimum Wages in the Philippines* Journal of The Philippine Statistician Vol. 63, No 2 (2014), pp. 71-85.
[http://philstat.org.ph/files/images/of Regional Minimum Wages in the Philippinea.pdf](http://philstat.org.ph/files/images/of_Regional_Minimum_Wages_in_the_Philippinea.pdf)
- Hastuti, Sri Rahayu Budi, (2012), *Analisis Upah Minimum Propinsi dan Determinannya di Indonesia Tahun 2004-2010*, Jurnal Buletin Ekonomi, FE UPN "Veteran" Yogyakarta, April 2012.
- Hsiao, Cheng, (1995), *Analysis Of Data Panel*, Cambridge University Press.
- Pusporini, Endah, (2006), *Pengaruh Kebutuhan Hidup Minimum, Indeks Harga Konsumen dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Upah Minimum Propinsi*, Penelitian FE UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Rachman, H, (2005), *Upah Minimum dan Upah Sundulan, Makalah Lokakarya Pengembangan Kewirausahaan Wanita Pengusaha*, APINDO-ILO, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman J, (2001), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Fak Ekonomi UI, Jakarta.
- Syahputra, Beny, (2005), *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Upah Minimum Regional Tenaga Kerja di Kabupaten Sleman*, Penelitian FE UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Tamada, Keiko, (2011), *"Analysis of the Determinants of Wages in Japan"*
[http://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2011/JLR30 tamada pdf](http://www.jil.go.jp/english/JLR/documents/2011/JLR30_tamada.pdf)
- Tempointeraktif, (2004), *Upah Minimum*, Jakarta.

Tjandraningsih, Indrasari dan Herawati, Rina, (2009), *Menuju Upah Layak: Survey Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia*.
[library.fes.de>bueros>indonesien](http://library.fes.de/bueros/indonesien).

Tjiptoherijanto, P, (1996), *Sumber Daya Dalam Pembangunan Nasional*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta

Todaro, Michael P. and Smith, Stephen C., (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.

Wilson, Mark, (2012), *The negative Effects of Minimum Wage Laws*, Policy Analysis No. 701 June 21.
<http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/PA701.pdf>
<http://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/PA701.pdf>

LAMPIRAN

Diagram 1 : Data asli Wilayah Indonesia Barat

UMP, KHL, PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI (IHK), PENAWARAN TK (AK), PRODUKTIVITAS TK

WILAYAH INDONESIA BARAT TAHUN 2008-2013

PROVINSI	TAHUN	UMP (Rp.000)	KHL (Rp)	PERT. EK (%)	INFLASI (IHK)	PENAW TK (orang)	PRODUKTIVITAS (Rp)
ACEH	2008	1000	1200000	-5,24	109,37	1793410	21014514
	2009	1200	1400000	-5,51	115,47	1897922	18575277
	2010	1300	1400000	2,74	119,06	1938519	18636411
	2011	1350	1476145	4,84	124,9	2001259	18734318
	2012	1400	1531459	5,14	127,19	1978491	20287421
	2013	1550	1514383	4,18	132	2034107	20833749
SUMUT	2008	822,2	783000	6,39	109,41	6094802	19163783
	2009	905	855124	5,07	114,31	6298070	19348961
	2010	965	916124	6,42	121,07	6617377	19380887
	2011	1035,5	966000	6,63	127,85	6314239	21411566
	2012	1200	1035028	6,22	132,93	6131664	23375847
	2013	1375	1295000	6,01	143,21	6311762	24160636
SUMBAR	2008	800	871000	6,88	110,54	2127512	17894241
	2009	880	896920	4,28	116,64	2172002	18242133
	2010	950	976000	5,94	122,62	2194040	19036432
	2011	1055	1099227	6,26	131,19	2213513	19941566
	2012	1150	1153456	6,38	136,87	2179826	21557183
	2013	1350	1348233	6,18	148,73	2156385	23254714
RIAU	2008	800	815665	5,65	109,1	2239385	44305190
	2009	901,6	1022669	2,97	113,87	2260862	45337840
	2010	1016	1053000	4,21	118,66	2377494	45034505
	2011	1120	1230491	5,04	126,21	2560402	42350801
	2012	1238	1312888	3,54	131,8	2506776	44313730
	2013	1400	1499378	2,61	140,6	2625848	43956980
JAMBI	2008	724	743169	7,16	110,7	1290854	12493273
	2009	800	918121	6,39	115,84	1334496	12908459
	2010	900	970662	7,35	123,4	1545683	11947443
	2011	1028	1027791	8,54	130,71	1495167	13215013
	2012	1142,5	1143576	7,44	136,62	1470920	14311035
	2013	1300	1321572	7,88	146,45	1452832	15898545
SUMSEL	2008	743	1100000	5,07	111,72	3472012	18194623
	2009	824,7	929642	4,11	116,6	3460365	18907884
	2010	927,8	1031902	5,63	121,19	3665044	18665711
	2011	1048,4	1060921	6,50	127,16	3770673	19140587
	2012	1195,2	1311000	6,01	131,41	3746373	20406813
	2013	1350	1757000	5,98	139,14	3646996	22054299
BENGKULU	2008	683,5	714750	5,75	111,41	810361	9581622
	2009	728	742499	5,62	118,01	829449	9757427
	2010	780	788956	6,10	125,5	855026	10223833
	2011	815	808031	6,46	133,48	894934	10162105
	2012	930	884289	6,60	139,14	861394	11399762
	2013	1200	1216089	6,21	150,76	841041	12547411
LAMPUNG	2008	617	650000	5,35	112,14	3568770	10386042
	2009	691	805308	5,26	120,32	3627155	10675711
	2010	767,5	861340	5,88	128,49	3957697	10272732
	2011	855	897600	6,43	138,63	3696066	11733317
	2012	975	1008109	6,53	144,28	3637897	12619019
	2013	1150	1060082	5,97	153,92	3595510	13625516
BABEL	2008	813	978720	4,60	113,04	524370	20061913
	2009	850	1237000	3,74	119,15	539410	20222642
	2010	910	1150500	5,99	126,64	620063	18602513
	2011	1024	1562000	6,50	137,8	611698	19661168
	2012	1110	1540330	5,73	145,99	604163	21020526
	2013	1265	1555206	5,29	157,97	619700	21624189

KEP. RIAU	2008	833	923000	6,63	111,14	666000	60426627
	2009	892	1022000	3,52	117,37	681769	61189772
	2010	925	1073264	7,19	122,02	826535	53381088
	2011	975	1139903	6,66	128,27	847997	56035408
	2012	1015	1080332	6,82	132,19	871365	56753037
	2013	1365,1	1395442	6,13	142,37	905269	58524291
DKI JAKARTA	2008	972,6	1055275	6,23	109,11	4772477	84374277
	2009	1069,9	1314059	5,02	113,81	4687727	90180702
	2010	1118	1317710	6,50	119,23	5272604	84358670
	2011	1290	1404829	6,73	125,33	5143826	92023493
	2012	1529	1497838	6,53	130,55	5368572	92961970
	2013	2200	1978789	6,11	139,39	5180014	101273468
JAWA BARAT	2008	568,2	614275	6,21	109,35	18743979	17607588
	2009	628,2	731680	4,19	113,44	18981260	17905562
	2010	671,5	743141	6,20	117,66	18893835	19018744
	2011	732	874693	6,51	121,47	19356624	19661866
	2012	780	874693	6,28	126,67	20150094	19908862
	2013	850	946689	6,06	134,98	20284633	21007884
JATENG	2008	547	612223	5,61	109,03	16690966	10850628
	2009	575	793693	5,14	114,3	17087649	11094478
	2010	660	803985	5,84	120,26	16856330	11827928
	2011	675	833465	6,03	125,94	16918797	12457177
	2012	765	833465	6,34	131,63	17095031	13069476
	2013	830	857727	5,81	140,94	16986776	13975136
DI Y	2008	586	687132	5,03	109,24	1999734	10151596
	2009	700	820484	4,43	114,85	2016694	10577649
	2010	745,7	750490	4,88	120,72	1882296	11854786
	2011	808	802335	5,17	127,78	1872912	12305035
	2012	892,7	862391	5,32	132,74	1944858	12479766
	2013	947,1	924284	5,40	141,69	1910959	13300782
JATIM	2008	500	544157	5,94	108,17	20178590	16148619
	2009	570	706698	5,01	112,93	20338568	16586872
	2010	630	856888	6,68	118,99	19527051	18305649
	2011	705	731635	7,22	126,45	19761886	19375749
	2012	745	731635	7,27	132,18	19901558	20630068
	2013	866	825000	6,55	141,12	20137795	21769879
BANTEN	2008	837	851500	5,77	111,08	4325455	18753031
	2009	917,5	917638	4,71	120	4357240	19442757
	2010	955,3	955708	6,11	125,41	5309462	19321483
	2011	1000	1019875	6,38	130,97	5210224	20795859
	2012	1042	1108000	6,15	136,65	5125057	21709886
	2013	1170	1170000	5,86	147,87	5146305	22828474
KALBAR	2008	645	776928	5,45	110,88	2157549	13564949
	2009	705	803914	4,80	118,57	2200895	13935060
	2010	741	866250	5,47	126,13	2197325	14471980
	2011	802,5	931146	5,98	134,41	2233195	14973354
	2012	900	1327014	5,81	142,95	2182524	16143997
	2013	1060	1402927	6,08	154,23	2140166	17564855
KALTENG	2008	765,9	825000	6,17	111,01	1029445	17028644
	2009	873,1	910670	5,57	115,71	1047402	17660443
	2010	986,5	947100	6,50	123,17	1066733	18390737
	2011	1134,6	1095000	6,77	131,84	1134587	18158696
	2012	1225	1720414	6,69	140,76	1105263	20015210
	2013	1553,1	1919413	7,37	150,14	1097627	21622110

piran 2 : Data asli Wilayah Indonesia Timur

UMP, KHL, PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI (IHK), PENAWARAN TK (AK), PRODUKTIVITAS TK
WILAYAH INDONESIA TENGAH TAHUN 2008-2013

PROVINSI	TAHUN	UMP (Rp.000)	KHL (Rp)	PERT. EK (%)	INFLASI (IHK)	PENAW TK (orang)	PRODUKTIVITAS (Rp)
BALI	2008	682,7	711099	5,97	107,74	2099278	12267937
	2009	760	956339	5,33	113,92	2123588	12750022
	2010	829,3	959232	5,83	121,12	2246149	13264700
	2011	890	1101766	6,49	128,53	2257258	13949902
	2012	967,5	1130779	6,65	134,25	2316033	14459499
2013	1181	2117000	6,05	143,25	2315379	15298830	
NTB	2008	730	727682	2,82	110,75	2029081	8819702
	2009	832,5	860000	12,14	117,73	2098638	9306997
	2010	890,8	1460099	6,35	126,54	2252076	9410985
	2011	950	1007000	-2,69	135,37	2072782	9954570
	2012	1000	1222088	-1,1	145,45	2088712	9762920
2013	1100	1403700	5,69	155,57	2094550	10302144	
NTT	2008	650	782466	4,84	109,1	2166919	5477481
	2009	725	909000	4,29	116,19	2250128	5512435
	2010	800	943404	5,25	128,47	2132381	6087145
	2011	850	973000	5,62	136,19	2154258	6321888
	2012	925	1164204	5,41	141,94	2158039	6665979
2013	1010	1336000	5,56	152,51	2143765	7103288	
KALSEL	2008	825	790000	6,45	110,38	1780220	16488747
	2009	930	947000	5,29	116,53	1821717	16952234
	2010	1024,5	997000	5,59	125,18	1840296	17592698
	2011	1126	1053379	6,12	132,3	1925684	17837733
	2012	1327,4	1227000	5,72	140,2	1922151	18894637
2013	1337,5	1227546	5,18	148,45	1882503	19985809	
KALTIM	2008	815	935440	4,9	112,66	1416963	81854132
	2009	955	1209870	2,28	119,52	1460996	80976334
	2010	1002	1327803	5,1	126,37	1648455	74872225
	2011	1084	1435374	4,09	135,76	1764696	72996720
	2012	1177	1531548	3,98	142,45r	1777381	74556641
2013	1752,1	1752073	1,59	154,16	1766330	75571087	
SULUT	2008	845	802035	10,86	111,15	1020952	16913433
	2009	929,5	863731	7,85	115,43	1051130	17697700
	2010	990	966372	7,16	121,09	1036574	19613870
	2011	1050	935000	7,39	125,61	1084203	19920335
	2012	1250	1077899	7,86	130,46	1038128	22236244
2013	1550	1291604	7,45	138,88	1014600	24156006	
SULTENG	2008	670	733000	7,78	110,11	1196988	13029267
	2009	720	915000	7,71	117,45	1215727	13807473
	2010	777,5	890000	8,74	123,8	1220454	15137954
	2011	827,5	900000	9,12	131,99	1313680	15250543
	2012	885	900000	9,24	138,56	1213063	18025756
2013	995	1036000	9,38	147,01	1228337	19541470	
SULSEL	2008	740,5	754884	7,78	109,32	3447879	13179508
	2009	905	1154080	6,23	115,04	3536920	14683501
	2010	1000	1049321	8,19	121,3	3571317	15646176
	2011	1100	1083000	7,61	127,6	3612424	16321663
	2012	1200	1161395	8,39	132,82	3560891	17816270
2013	1440	1380500	7,65	140,41	3468192	19531742	
SULTRA	2008	700	640000	7,27	111,06	979256	10844334
	2009	770	823838	7,57	121,69	998195	11324926
	2010	860	895188	8,22	125,33	1045899	11681124
	2011	930	1013769	8,96	133,35	1058999	12369729
	2012	1032,3	1232820	10,41	139,21r	1016957	14366894
2013	1125,2	1207684	7,28	146,29	1014192	15522856	

GORONTALO	2008	600	798852	7,76	109,09	429384	6222015
	2009	675	889000	7,54	116,9	447313	6439299
	2010	710	921647	7,63	122,64	456499	6737872
	2011	762,5	996367	7,68	129,28	456499	7056127
	2012	837,5	1099222	7,71	136,94	466073	7591652
	2013	1175	1539539	7,76	143	468380	8119613
SULBAR	2008	760,5	850000	12,07	113,27	495959	7016769
	2009	909,4	1126000	6,03	119,41	511144	8412555
	2010	944,2	1258973	11,89	124,09	532171	9214030
	2011	1006	1381470	10,32	131,48	551631	9762306
	2012	1127	1381470	9,01	140,52	560762	10394504
	2013	1165	1403666	7,16	146,86	536475	11666244

Diagram 3 : Data asli Wilayah Indonesia Timur

UMP, KHL, PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI (IHK), PENAWARAN TK (AK), PRODUKTIVITAS TK
 WILAYAH INDONESIA TIMUR TAHUN 2008-2013

PROVINSI	TAHUN	UMP (Rp.000)	KHL (Rp)	PERT. EK (%)	INFLASI (IHK)	PENAW TK (orang)	PRODUKTIVITAS (Rp)
MALUKU	2008	700	1182556	4,23	110,4	559239	7580947
	2009	775	1280599	5,44	113,17	596030	7490971
	2010	840	1400990	6,47	123,71	651339	7248947
	2011	900	1570980	6,06	130,26	701893	6935987
	2012	975	1739000	7,81	139,73	659953	7964700
	2013	1275	1738676	5,14	147,74	663481	8536035
MALUT	2008	700	1090127	5,99	112,41	421880	6718421
	2009	770	1520000	6,07	117,96	422398	7135494
	2010	847	1500092	7,95	123,15	437758	7380379
	2011	889,4	1090000	6,4	129,23	463604	7376734
	2012	960,5	1903311	6,67	134,87	466110	7761082
	2013	1200,6	1712000	6,12	143,8	463243	8209791
PAPUA BRT	2008	1050	1638746	7,84	121,39	342382	20144026
	2009	1100	1325843	13,87	132,29	352385	20776709
	2010	1210	1421814	28,47	140,61	342888	29572228
	2011	1410	1800000	27,01	144,03	369619	35325509
	2012	1450	1800000	15,9	150,15	361597	40323295
	2013	1720	2117000	9,3	162,35	370750	42592504
PAPUA	2008	1105,5	1638746	-1,4	110,47	1075214	18531881
	2009	1216	1734054	22,22	115,23	1128036	21188454
	2010	1316,5	1799228	-3,19	120,15	1510176	15378859
	2011	1403	1781356	-5,32	125,19	1536728	14366354
	2012	1515	1904000	1,08	128,31	1585434	14029525
	2013	1710	2069318	14,84	137,87	1688876	15062209

Lampiran 4 : Hasil Regresi data wilayah Indonesia Barat

HASIL REGRESI DENGAN COMMON EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(UMP)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/08/15 Time: 23:38
 Sample: 2008 2013
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 18
 Total panel (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6.798703	0.688377	-9.876430	0.0000
LOG(KHL)	0.694688	0.071108	9.769483	0.0000
PE	-0.002306	0.006362	-0.362520	0.7177
LOG(INF)	0.606259	0.161143	3.762247	0.0003
LOG(PROD)	0.074447	0.024062	3.093981	0.0025
LOG(AK)	-0.009923	0.010915	-0.909094	0.3654
R-squared	0.852116	Mean dependent var		6.828026
Adjusted R-squared	0.844867	S.D. dependent var		0.267005
S.E. of regression	0.105165	Akaike info criterion		-1.612621
Sum squared resid	1.128086	Schwarz criterion		-1.463613
Log likelihood	93.08152	Hannan-Quinn criter.		-1.552204
F-statistic	117.5461	Durbin-Watson stat		0.515690
Prob(F-statistic)	0.000000			

HASIL REGRESI DENGAN FIXED EFFECT MODEL

Dependent Variable: LOG(UMP)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/08/15 Time: 23:42
 Sample: 2008 2013
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 18
 Total panel (balanced) observations: 108

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.765618	5.440440	-1.427388	0.1571
LOG(KHL)	0.259925	0.064481	4.031045	0.0001
PE	0.003111	0.004394	0.708017	0.4809
LOG(INF)	1.236500	0.241899	5.111639	0.0000
LOG(PROD)	0.246724	0.203513	1.212327	0.2287
LOG(AK)	0.057211	0.214747	0.266412	0.7908

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.968264	Mean dependent var	6.828026
Adjusted R-squared	0.960050	S.D. dependent var	0.267005
S.E. of regression	0.053368	Akaike info criterion	-2.836772
Sum squared resid	0.242090	Schwarz criterion	-2.265577
Log likelihood	176.1857	Hannan-Quinn criter.	-2.605173
F-statistic	117.8782	Durbin-Watson stat	1.101067
Prob(F-statistic)	0.000000		